

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran hutan mangrove sangat vital dan penting dalam melindungi keseimbangan ekosistem di darat dan laut. Hutan mangrove memiliki kemampuan untuk memecah ombak laut sehingga dapat mengurangi erosi pantai, menjadi tempat tinggal bagi ikan, dan berfungsi sebagai penyerap karbon dan polusi yang bersumber dari sampah manusia dan kapal yang berlabuh di sekitar pantai. Nutam selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) menjelaskan bahwa di Kalimantan Utara (Kaltara), wilayah ekologis mangrove membentang dari Delta Kayan di Kabupaten Bulungan hingga Sembakung di Kabupaten Nunukan. Kawasan mangrove ini memiliki luas mencapai 442.724,84 hektare (Ha). Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Universitas Mulawarman-Samarinda, menyatakan bahwa mayoritas kawasan ekologis mangrove berubah fungsi menjadi ladang tambak, dengan persentase sebesar 62% lahan mangrove yang menjadi tambak seluas 273.187,44 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa pembukaan lahan hutan mangrove marak terjadi di Kaltara.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Peraturan Presiden RI No. 120 Tahun 2020 tentang perencanaan untuk memulihkan kawasan mangrove yang telah rusak melalui rehabilitasi melalui pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Kepala BRGM, Hartono mengungkapkan bahwa jika tambak sudah ada dalam kawasan hutan dan dimanfaatkan oleh petambak, maka pilihan terbaik adalah dengan mendorong penanaman mangrove dengan pola *silvofishery*. Menurut Yudha (2010), *Silvofishery* atau dikenal dengan wanamina merupakan bentuk integrasi budidaya perikanan air payau dengan bentuk penanaman mangrove pada satu lokasi. Sebuah konsep budidaya perikanan tradisional ini dikembangkan untuk meminimalisir input namun memiliki nilai ekologi dan ekonomis tinggi. Hal ini dilakukan agar

tambak dapat difungsikan secara berkelanjutan dan tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa menghilangkan fungsi ekologi. BRGM mengajak masyarakat terutama para pengusaha dan petambak untuk menanam mangrove dalam pengelolaan tambak untuk mengembangkan tambak yang ramah lingkungan.

Melalui riset dan hasil wawancara yang dilakukan penulis, upaya yang sudah dilakukan oleh BRGM adalah dengan menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) untuk meminimalisir pembukaan lahan mangrove dan melakukan pendekatan kepada masyarakat yang berkaitan langsung dengan pertambakan kemudian mendokumentasikan aksi kerja sama tersebut dan memberikan edukasi dalam media informasi seperti website, surat kabar, instagram dan twitter. Berdasarkan wawancara dengan Yuyus, petambak sudah mengetahui tentang adanya peraturan ini, namun petambak masih memiliki pola pikir bahwa dengan pola *silvofishery* ini pemerintah akan merebut kembali kawasan yang sudah dibuka secara ilegal oleh petambak. Kemudian, petambak masih kurang paham bagaimana cara penanaman mangrove bisa mengembangkan produktivitas tambak dan keberadaan mangrove yang dirasa mencemari tambak.

Dari permasalahan ini, perlu dikembangkan dengan usaha persuasi kepada petambak untuk memiliki pola pikir bahwa penanaman mangrove memiliki manfaat yang positif dan resiko dari penanaman mangrove dapat diminimalisir dengan pengelolaan yang tepat. Persuasi yang dimaksud adalah menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak melalui kampanye dengan serangkaian tindakan komunikasi terencana yang dilakukan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu (Rogers dan Storey, 1987). Kampanye terhadap petambak ini akan memberikan kesadaran dan meningkatkan partisipasi petambak dalam melestarikan ekosistem mangrove di dalam tambaknya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka ditemukan masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya keterlibatan petambak pada peraturan pemerintah untuk melaksanakan rehabilitasi mangrove.
2. Dibutuhkan sebuah usaha untuk persuasi untuk mengubah pola pikir petambak terhadap mangrove.

Dari permasalahan tersebut penulis merumuskan permasalahan yang ada yaitu “bagaimana perancangan kampanye untuk mengedukasi dan mempersuasi petambak di Kalimantan Utara untuk bersedia menanam mangrove dalam pengelolaan tambak?”.

1.3 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian serta perancangan, maka ditentukanlah bahwa batasan-batasan masalah yang ada sebagai berikut:

1. Topik kampanye hanya akan membahas upaya penanaman mangrove dengan pola *silvofishery*. Yudha (2010), *Silvofishery* atau dikenal dengan wanamina merupakan bentuk integrasi budidaya perikanan air payau dengan bentuk penanaman mangrove pada satu lokasi. Sebuah konsep budidaya perikanan tradisional ini dikembangkan untuk meminimalisir input namun memiliki nilai ekologi dan ekonomis tinggi.
2. Demografis
 - a) Usia : 25–35 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yuyus, pemilik tambak rata-rata berusia 50 hingga 65 tahun, namun mayoritas mereka dibantu pengelolaan tambaknya oleh anaknya yang berusia sekitar 25-35 tahun. Dari data ini penulis lebih menargetkan petambak generasi muda dengan rentang usia sekitar 25-35 tahun. Alasannya generasi muda lebih mudah untuk dipersuasi dan diedukasi karena pola pikir lebih terbuka dan mudah menerima suatu inovasi yang berbeda

dibandingkan generasi senior. Kemudian, generasi muda ditargetkan untuk keberlangungan dan sebagai referensi kampanye di masa yang akan datang.

b) SES : SES C – SES B.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022, rata-rata penghasilan bulanan yang diperoleh oleh pekerja buruh kelompok lapangan pekerjaan dari bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah sekitar Rp. 2.408.769 sampai Rp. 2.733.489. Sementara, berdasarkan data dari untuk penghasilan bulanan yang diperoleh oleh pengusaha tambak di Kalimantan bersifat tentatif berdasarkan hasil panen yang ada namun setiap panen berkisar Rp.4.000.000 sampai dengan Rp.6.000.000

c) Pekerjaan : Orang yang bermata pencaharian dari tambak, peternak tambak, pengusaha tambak.

Kampanye ini menargetkan orang yang bermata pencaharian dari tambak karena tambak merupakan fokus utama dari kampanye edukasi penanaman mangrove dalam pengelolaan tambak.

3. Geografis

Masyarakat di Kalimantan Utara, berfokus pada daerah sekitar pesisir pantai, sungai dan hutan mangrove. Sementara target sekundernya adalah daerah kota dan pusat pemerintahan karena petambak juga beraktivitas ke kota dan bahkan tinggal di kota.

4. Psikografis

Orang yang kurang memahami pengetahuan tentang fungsi hutan mangrove; orang yang memiliki rasa peduli dengan lingkungan; kurang memahami cara melestarikan dan menjaga lingkungan; mempunyai rasa ingin tahu tentang cara melestarikan lingkungan hutan mangrove.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan permasalahan yang telah ditulis diatas, tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk merancang kampanye mengenai penanaman mangrove dalam pengelolaan tambak di Kalimantan Utara.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Perancangan tugas akhir ini memiliki manfaat sebagai edukasi penanaman mangrove dan aksi peduli lingkungan melalui pengelolaan tambak ramah lingkungan serta manfaat lain, yaitu:

1. Bagi Penulis

Penulis mampu mendapatkan pengetahuan baru seputar rehabilitasi hutan mangrove dalam mengelola tambak ramah lingkungan. Penulis juga mendapat pengalaman baru dalam mempraktekkan secara langsung ilmu yang sudah diperoleh dalam masa perkuliahan.

2. Bagi BRGM

Mendapat solusi berupa kampanye yang dapat diimplementasikan ketika melakukan sosialisasi dengan terjun langsung di masyarakat dan dapat turut mewujudkan restorasi hutan mangrove.

3. Bagi Masyarakat

Mendapatkan informasi dan edukasi tentang rehabilitasi hutan mangrove sehingga masyarakat dapat turut melestarikan lingkungan hidup di sekitarnya.

4. Bagi Universitas

Hasil perancangan kampanye ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa lainnya yang ingin melakukan perancangan dengan topik serupa, terutama topik kampanye yang berhubungan dengan lingkungan dan sebagai arsip informasi bagi pihak universitas.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A